

KONSTRUKSI PARTAI GOLKAR DALAM KASUS GUBERNUR PEREMPUAN PERTAMA DI INDONESIA MENURUT 2 MEDIA ONLINE

Muhammad Asnan, Eko Budi Siswandoyo

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gajayana Malang

Jalan Mertojoyo Blok L Merjosari Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia

Email : asnan@unigamalang.ac.id

Abstrak

Dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten yang mendera Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia menjadi peristiwa yang cukup menarik. Aspek menariknya terletak pada aktor yang terlibat di dalamnya yakni Ratu Atut Chosyiah, Gubernur Provinsi Banten periode 2012 -2017. Selain dikenal sebagai pejabat pemerintah, Atut adalah seorang politisi sebuah partai politik (Partai Golkar) Bagi media massa, peristiwa politik semacam ini merupakan bahan liputan yang menarik karena bernilai berita tinggi. Dalam konteks konstruksi realitas oleh media, masing-masing media memiliki pertimbangan dan makna yang dirujuk kepada kebijakan redaksi media bersangkutan. Pada akhirnya, satu peristiwa yang sama dimaknai secara berbeda-beda oleh media. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana metrotvnews.com dan viva.co.id mengonstruksi berita Partai Golkar dalam kasus Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia. Untuk keperluan analisis digunakan analisis framing Pan dan Kosicki yang meliputi struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik dengan unit analisis berupa teks berita. Hasilnya, konstruksi berita Partai Golkar dalam kasus Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia oleh [Metrotvnews.com](http://metrotvnews.com) cenderung bersifat negatif. Sedangkan [Viva.co.id](http://viva.co.id), walaupun berupaya membingkai Partai Golkar ke arah lebih netral, namun dalam beberapa hal tercium aroma keberpihakan media

Kata kunci: *Golkar, gubernur perempuan, media online, framing*

CONSTRUCTION OF GOLKAR PARTY IN THE CASE OF THE FIRST WOMAN GOVERNOR IN INDONESIA ACCORDING TO TWO ONLINE MEDIA

Abstract

Alleged bribery in the handling of dispute over Lebak Regional Election and the corruption in the procurement of medical devices in Banten Province that had plagued the First Female Governor in Indonesia became a quite interesting event. The interesting aspect lied in the involved actor in the case, namely Ratu Atut Chosyiah, Governor of Banten Province for the period 2012-2017. Besides being known as a government official, Atut was a politician of a political party (Golkar Party). For mass media, this kind of political event is an interesting material for coverage because it had high news value. In the context of the reality construction presented by the media, each media turned out to have considerations and meanings referring to the editors' policies of the media. In the end, the same event was differently interpreted by the media Using the qualitative approach with descriptive type, this study aimed to describe how metrotvnews.com and viva.co.id had constructed the Golkar Party news in the case of the First Female Governor in Indonesia. For

the purpose of analysis, the framing analysis of Pan and Kosicki was used, which included syntactic, script, thematic and rhetorical structures with analysis unit in the form of news texts. As a result, the construction of the Golkar Party's news in the case of the First Governor of Women in Indonesia by *Metrotvnews.com* tended to be negative. While *Viva.co.id*, although trying to frame the Golkar Party in a more neutral direction behind these efforts, there was a smell of media alignments

Keywords: *Golkar, female governor, online media, framing.*

Pendahuluan

Setelah terpilih menjadi penguasa Provinsi Banten periode 2012 – 2017, Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia Ratu Atut Chosyiah harus berurusan dengan hukum akibat kasus yang dideranya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui ketuanya Abraham Samad menyatakan bahwa Atut ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi yakni sengketa Pilkada Lebak dan kasus Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten. Bersama Tubagus Chaeri Wardana. Tersangka Atut dijerat dengan pasal 6 ayat 1 Huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP terkait pemberian suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (www.bbc.com. Diakses 4 Mei 2017)

Dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten yang melibatkan Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia merupakan peristiwa yang cukup menarik. Tingginya perhatian publik pada kasus ini tidak lepas dari aktor yang terlibat di dalamnya yakni Ratu Atut Chosyiah, Gubernur Provinsi Banten periode 2012 -2017. Perempuan yang pada periode sebelumnya juga menjabat pada posisi sama ini selain dikenal sebagai sosok pejabat pemerintahan, juga merupakan

politisi dari sebuah partai politik (Partai Golkar). Maka tidak mengherankan apabila kasus yang sesungguhnya merupakan pelanggaran hukum semata tersebut harus terseret dan menyentuh pusaran politik. Padahal, seperti penjelasan Mc Nair bahwa pemberitaan media yang menyoroti peristiwa-peristiwa politik merupakan bahan liputan yang menarik karena bernilai berita tinggi (dalam Hamad, 2004:1), terlebih jika berita tersebut melibatkan sosok tokoh (Siregar dalam Wulandari, 2016:89).

Setiap liputan peristiwa termasuk liputan politik baik tertulis atau hasil rekaman sesungguhnya adalah hasil dari konstruksi atas realitas. Proses konstruksi tersebut dibangun dengan menyusun sejumlah peristiwa yang semula terpenggal-penggal (acak) menjadi tersistematis hingga membentuk wacana atau cerita yang bermakna (Nimmo dalam Hamad, 2004:10), melalui bahasa sebagai elemen utama dalam memberikan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas yang akan muncul di benak khalayak (DeFleur, Melvin and Sandra Ball-Rocheach, 1989:265-269).

Penting untuk dipahami bahwa dalam setiap konstruksi realitas, masing-masing media memiliki pertimbangan dan makna yang disesuaikan dengan kebijakan redaksi media bersangkutan (*redactional concept*) (Hamad, 2004:26). Pertimbangannya dapat didasarkan atas kepentingan internal maupun eksternal media, baik bersifat idealis, ideologi, ekonomi, termasuk faktor arah politik media bersangkutan.. Asumsi ini diperkuat salah satunya seperti diungkapkan Lalapelo bahwa pengkonstruksian berita oleh media massa ternyata tidak pernah lepas dari pengaruh politik dalam menentukan arah berita dan menentukan seleksi informasi. Dalam keyakinannya Lalapelo bahkan menyebut tidak ada media massa yang tidak memiliki arah afiliasi politik tertentu atau yang tidak

pernah terlibat dengan konglomerasi media (Lalapelo dalam Wulandari, 2016:90)

Munculnya perbedaan pertimbangan media yang dipengaruhi baik faktor internal maupun eksternal tentu saja berimplikasi pada potensi ketidakseragaman konstruksi berita yang disajikan masing-masing media, yang dalam tataran tertentu nilai obyektifitas berita sering dipermasalahkan. Padahal, bersama keberimbangan (impersialitas) obyektifitas merupakan kemutlakan penciptaan isu atas produk sebuah berita (Wulandari, 2016:89). Pernyataan ini juga dipertegas Eriyanto (2002:16) bahwa realitas tidak bisa dipindah begitu saja ke dalam media. Realitas media hadir sebagai produk interaksi antara wartawan dan fakta (Eriyanto, 2002:16).

Sebagai realitas politik yang berkembang di tengah-tengah publik, kemunculan kasus Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia tentu saja membawa konsekuensi pengkonstruksian yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara satu media dengan media lainnya. Seperti diketahui bahwa dalam Pilkada Banten periode 2012 – 2017, Sang Gubernur diusung oleh 11 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Banten dan 22 Partai Politik non parlemen. Kesebelas partai tersebut antara lain Partai Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PBB, PPNUI, PKPB, PDS PPD (nasional.kompas.com. Diakses 4 Mei 2017).

Partai Golkar yang menjadi salah satu partai pengusung, sedikit banyak memungkinkan akan terimbas oleh kasus tersebut. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Perempuan Putri Jawa Barat Tubagus Chasan tersebut sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Perempuan Periode 2009 – 2014. Salah satu cara yang dipakai untuk menangkap masing-masing media dalam mengkonstruksi suatu realitas adalah *framing*

(Eriyanto, 2002:7). Secara sederhana, sasaran analisis *framing* adalah untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media melalui proses konstruksi.

Metrotvnews.com dan Viva.co.id adalah dua media *online* yang mempunyai intensitas cukup tinggi dalam memberitakan peristiwa hukum dan politik. Ke-aktifan kedua portal berita tersebut melakukan pemberitaan terhadap isu-isu politik dan hukum yang tengah menjadi sorotan publik termasuk dalam kasus ini pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan peneliti menggunakan kedua media tersebut sebagai sasaran penelitian.

Menggunakan model analisis *framing* yang bersumber dari Pan dan Kosicki, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Metrotvnews.com dan Viva.co.id mengkonstruksi berita Partai Golkar dalam kasus Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia melalui bingkai beritanya Dalam pandangan Pan dan Kosicki *framing* adalah strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konversi pembentukan berita (Eriyanto, 2002:68).

Dari sebelas Partai Pengusung, peneliti hanya fokus pada satu partai saja yakni berita-berita Partai Golkar dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten yang melibatkan Sang Gubernur. Dipilihnya Partai Golkar tidak lepas dari kedudukan Gubernur bersangkutan sebagai petinggi Partai Golkar. Pemilihan waktu penelitian didasarkan pertimbangan bahwa meskipun proses hukum dan pemberitaan media terhadap kasus ini masih berjalan sampai tahun 2017 akan tetapi intensitas pemberitaan media dan momentumnya yang berhimpitan dengan Pemilu Legislatif dan

Pemilihan Presiden 2014 secara langsung menjadikan kajian ini menjadi tetap menarik.

Kajian Teori

Media Massa dan Konstruksi Realitas Politik

Kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna (Hamad, 2004:11).

Dalam proses konstruksi realitas, Tuchman dalam Hamad (2002:11). Menyebut bahasa sebagai unsur utama. Penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan makna) tertentu. Dari perspektif ini, bahasa bahkan bukan hanya sebatas mencerminkan realitas, tetapi dapat pula menciptakan realitas (Hamad, 2004:13). Kekuatan kata-kata dan struktur bahasa yang mampu menentukan makna (gambaran) realitas tersebut pada gilirannya menempatkan bahasa (baca: pembicaraan politik) dapat didayagunakan untuk kepentingan politik (Bennet dalam Hamad, 2004:15).

Peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan. Hal ini terjadi karena 2 (dua) faktor. Pertama, untuk saat sekarang politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*), kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka. (Mc Nair dalam Hamad, 2004:1).

Hamad (2004:16) mengungkapkan beberapa tindakan yang dilakukan pekerja media, khususnya oleh para komunikator massa tatkala melakukan konstruksi realitas yakni melalui pemilihan simbol (fungsi

bahasa) dan pemilihan fakta yang disajikan (strategi *framing*). Pemilihan kata (simbol politik), sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, tapi telah menjadi sifat dari pembicaraan politik untuk selalu memperhitungkan simbol politik (Hamad, 2004:16, Triyono 2016:171)

Pertama, dalam hal pilihan kata (simbol politik), meskipun media massa hanya bersifat melaporkan, tapi telah menjadi sifat dari pembicaraan politik untuk senantiasa memperhitungkan simbol politik. Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra-citra atau makna-makna melalui lambang politik. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan (simbol-simbol) politik yang diterimanya (Nimmo dalam Hamad, 2004:16). Ketika melakukan pengutipan langsung (*direct quotation*) atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber berita, media massa tetap terlibat (langsung atau tidak langsung) dengan pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut. Pengambilan satu narasumber tentu didasarkan atas pertimbangan tertentu. Pada saat media massa membuat ulasan, pilihan kata (simbol) itu ditentukan oleh sang komunikator massa. Apapun simbol yang dipilih akan mempengaruhi makna yang muncul (Zhoest dalam Hamad, 2004:16).

Kedua, dalam melakukan pembedaan (*framing*) peristiwa politik, jarang ada media yang membuat berita sebuah peristiwa secara utuh mulai menit pertama hingga menit terakhir. Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit, dicoba disederhanakan melalui mekanisme pembedaan (*framing*) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Untuk kepentingan pemberitaan tersebut, komunikator massa seringkali hanya menyoroiti hal-hal penting (mempunyai nilai berita) dari sebuah peristiwa politik,

sehingga mulai dapat ditebak ke arah mana pembentukan (formasi) sebuah berita. Konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang akan diuntungkan) dengan suatu berita, dimana kepentingan itu bisa dimiliki oleh media atau pihak yang memiliki relasi khusus dengan media tersebut (Gandy dalam Hamad, 2004:21).

Secara eksternal, media massa yang tidak hidup dalam situasi vakum pada struktur dan penampilannya akan dipengaruhi oleh sistem politik sebuah negara. Namun apapun pertimbangannya, yang pasti selalu ada yang ditonjolkan, disamakan, atau tidak diangkat sama sekali dalam setiap pengkonstruksian realitas. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh konstruksi realitas media adalah jurnalis itu sendiri sebagai makhluk sosial (Hamad, 2004:26-27).

Analisis Framing Pan dan Kosicki

Secara sederhana, analisis framing merupakan sebuah analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaiannya tentu saja melalui proses konstruksi. Di sini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi melalui makna tertentu. Konsekuensinya, bingkai berita antar media massa pun juga menjadi tidak sama (Eriyanto, 2009:3)

Bagi Pan dan Kosicki terdapat 2 (dua) konsepsi dari framing yang saling berkaitan Pertama, pada konsepsi psikologi yaitu bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya serta bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Kedua, konsepsi sosiologis yaitu bagaimana individu menafsirkan suatu peristiwa menurut sudut pandang tertentu. Bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan

menafsirkan pengalaman, untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya (Eriyanto, 2002:252-253).

Dalam pendekatan Pan dan Kosicki, perangkat framing dapat dibagi dalam 4 (empat) struktur besar yaitu: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, struktur retorik (Eriyanto, 2002:257-266). Struktur sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pertanyaan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa-kedalam bentuk susunan kisah berita. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah Piramida Terbalik dengan unit pengamatan berupa: a) *Headline*/Judul berita, b) *Lead*/Teras berita, c) Latar Informasi, d) Kutipan Sumber.

Struktur skrip berhubungan dengan laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Bentuk umum dari struktur skrip adalah 5 W + 1 H (*who, what, when, where, why dan how*). Sementara struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis, bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Elemen-elemen perangkat tematik meliputi; koherensi, pertalian atau jalinan antar kata, proposi atau kalimat. Ada beberapa macam koherensi, yaitu: a) Koherensi sebab-akibat, b) Koherensi penjelas, dan c) Koherensi pembeda. (Eriyanto, 2002:260-264).

Struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan melalui pesan maupun unsur grafis. Elemen grafis muncul dalam bentuk foto, gambar dan tabel (Eriyanto, 2002:264-266). Tabel 1 menunjukkan elemen-elemen framing Pan dan Kosicki.

Tabel 1
Skema Elemen-Elemen Framing Model Pan dan Kosicki

STRUKTUR	PERINGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	Kelengkapan berita	5W+1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	1. Detail 2. Koherensi 3. Bentuk kalimat 4. Kata ganti	Paragra, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	1. leksikon 2. Grafis 3. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Eriyanto (2009:256)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggalang atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita (Bungin, 2001:82). Sedangkan penggunaan tipe deskriptif dimaksudkan untuk membuat deskripsi secara sistematis, aktual, dan akurat tentang fakta-fakta atau obyek tertentu (Kriyantono, 2007:58). Dengan demikian penelitian ini tidak untuk menguji hipotesis, membuat prediksi, mempelajari implikasi tetapi hanya untuk mendapatkan gambaran.

Sasaran penelitian ini adalah dokumentasi berita-berita Partai Golkar dalam kasus Gubernur Perempuan di Indonesia Ratu Atut Chosiyah di *Metrotvnews.com* dan *Viva.co.id* tanggal 20– 21 Desember 2013 dengan unit analisis pada berita tipe *straight news* berupa teks berita. Pemilihan waktunya

didasarkan pertimbangan bahwa meskipun proses hukum dan pemberitaan media terhadap kasus ini masih berjalan sampai tahun 2017 akan tetapi intensitas pemberitaan media dan momentumnya yang berhimpitan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 secara langsung menjadikan kajian ini menjadi lebih menarik.

Untuk keperluan pengumpulan data, metode yang digunakan meliputi: 1) Dokumentasi, 2) Observasi, Pemilihan sumber data didasarkan pada sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi berita-berita Partai Golkar dalam kasus Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia Ratu Atut Chosiyah yang dimuat di *Metrotvnews.com* dan *Viva.co.id* pada 20 - 21 Desember 2013. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi literatur berupa pembacaan secara mendalam mengenai metode-metode penelitian, teori-teori sosial serta fenomena yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

Menggunakan analisis framing Model Pan dan Kosicki, teknik analisis dilakukan dengan mencatat dan mengamati berita-berita Partai Golkar dalam kasus Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia Ratu Atut Chosiyah di *Metronews.com* dan *Viva.co.id* dalam kurun waktu 20 – 21 Desember 2013. Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi dalam struktur besar yaitu; struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik (Eriyanto, 2002:255-256).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggapan Partai Golkar Terhadap Penahanan Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia Ratu Atut Chosiyah - Framing *Metrotvnews.com*

Penahanan Gubernur perempuan Pertama di Indonesia Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

disikapi Metrotvnews.com dengan membidik pandangan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai sumber wawancara. Secara sintaksis, dengan mengambil judul "Atut Ditahan KPK, Ical: Aduh, Sedih Betul," makna yang coba dikonstruksikan awak redaksi adalah betapa berharganya Ratu Atut bagi kelangsungan Partai Golkar terutama di Provinsi Banten, sehingga seorang Ketua Umumnya harus mengekspresikan kesedihan tatkala mendengar kabar tersebut.

Paralel dengan judul berita, penampilan *lead* di buka dengan kalimat "Aburizal Bakrie mengaku sedih mendengar kabar penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah...." Kalimat ini kemudian dilanjutkan dengan rasa penasaran Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut terhadap kronologi berlangsungnya penahanan.

Meskipun sumber kutipan berasal dari satu orang yakni Aburizal Bakrie saja, namun porsi komentar yang dikutip secara langsung terbilang kecil dan singkat. Yang tampak menonjol justru penggambaran redaksi Metrotvnews.com terkait keberadaan Ratu Atut dan keluarganya sebagai kontributor bagi Partai Golkar dalam mendulang suara di Banten (paragraf ke-5). Sehingga, penahanan Atut tentu saja akan berimbas pada suara Partai berlambang Pohon Beringin ini dalam menghadapi Pemilu 2014. Selengkapnya teks paragraf ke-5 adalah:

Di jajaran Partai Golkar, Atut dan keluarga besarnya merupakan andalan untuk meraup suara di Banten. Maka penahanan terhadap Atut karena dikenai sangkaan terlibat kasus suap terhadap Akil Mochtar selaku Ketua MK dalam sidang perkara sengketa Pemilu Kada Lebak merupakan ancaman bagi Golkar dalam menghadapi Pemilu 2014 (www.metrotvnews.com) diakses 10 September 2017)

Dari kutipan diatas, status Atut yang ditahan KPK ibarat kehilangan besar bagi Partai Golkar dan berpotensi mempengaruhi suara Golkar pada Pemilu Legislatif 2014.

Secara skrip, semua unsur 5W+1H telah terwakili dalam teks berita. Sedangkan struktur tematik hadir dengan 3 (tiga) tema utama. Pertama, pernyataan Aburizal Bakrie yang mengaku sedih mendengar Ratu Atut ditahan oleh KPK. Dalam teks, tema ini diletakkan pada paragraf awal dengan uraian yang cukup singkat (paragraf 1 dan 2). Tema kedua, berkaitan dengan sikap Partai Golkar yang akan menghormati proses hukum Atut yang berlangsung di KPK sekaligus ajakan agar mengedepankan azas praduga tak bersalah. Pembahasan tema ini dalam teks ternyata juga tidak dilengkapi dengan detail secara panjang (paragraf 3 dan 4). Berikut ini teks lengkap paragraf 2, 3, 4:

"Aduh sedih betul," ujar ical yang di sela seminar guru besar Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Jumat (20/12) sore.

Ical memastikan partainya menghormati proses hukum yang berlangsung di KPK. Dia mengingatkan status Atut yang masih tersangka dan azas praduga tak bersalah yang tetap harus dijunjung tinggi.

"Ditahan kan belum tentu bersalah. Kan ada masa penahanan. Kita jalani saja." Tambahnya.

(www.metrotvnews.com) diakses 10 September 2017)

Tema ketiga, menyangkut arti penting Ratu Atut dan keluarganya bagi kelangsungan Partai Golkar di Banten. Status Ratu Atut yang mendekam dalam tahanan KPK saat ini bisa jadi akan melemahkan posisi Golkar dalam kontestasi memperebutkan suara pemilih pada Pemilu 2014 (paragraf ke-5).

Meskipun diletakkan di paragraf akhir (paragraf ke-6), namun dengan *embel-embel* aspek yuridis sebagai pendukung tema ketiga, maka elemen maksud pada bagian

ini secara implisit dapat dimaknai sebagai langkah memposisikan tema ketiga sebagai hal yang paling penting (mengandung unsur retorik sebagai makna yang ditekankan) bagi khalayak untuk dipahami. Setidaknya, melalui pesan ini tujuan yang disasar adalah terpengaruhinya para pemilih untuk mempertimbangkan kembali pilihannya kepada Partai Golkar pada Pemilu 2014 mendatang.

Teks paragraf ke-6 adalah: "Atut dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana."

Disamping menggunakan aspek yuridis dalam wacana berita, keberadaan struktur retorik lainnya dapat dilacak dari pemilihan kata "ancaman." Pemakaian kata ini oleh redaksi dapat diasumsikan sebagai upaya mengingatkan pembaca akan imbas penahanan Ratu Atut terhadap eksistensi Golkar (karena Dinasti Atut adalah andalan Golkar (paragraf ke-5). Foto berita yang ditonjolkan menggambarkan ekspresi wajah Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri yang sedang sedih.

Tanggapan Partai Golkar Terhadap Penahanan Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia Ratu Atut Chosiyah - Framing Viva.co.id

Berbeda dengan Metrotvnews.com, *framing* tanggapan atas penahanan Gubernur Perempuan Pertama Ratu Atut Chosiyah dihadirkan Viva.co.id melalui judul "Atut Ditahan, Golkar: Kami Hormati Putusan KPK". Dari aspek judul, kesan terpapar adalah obyektifitas. Akan tetapi jika dibaca dari penyusunan fakta melalui *lead* yang disajikan, kesan tersebut akan berubah sebaliknya. Yang lebih mengemuka justru konfigurasi kepentingan media untuk mencitrakan respon Golkar tersebut secara positif

kepada khalayak. *Lead* berita yang disusun berdasarkan pernyataan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Thohari menyebutkan bahwa dirinya mengaku prihatin atas keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang langsung menahan Atut pada pemeriksaan pertama dirinya sebagai tersangka. Sebaliknya Hajriyanto justru memuji sikap Atut untuk hadir dalam pemeriksaan di KPK.

Pernyataan Hajriyanto tersebut dikokohkan kembali dalam bentuk kutipan yang secara khusus diletakkan pada paragraf setelah *lead* berita, tepatnya paragraf ke-2 dan ke-3. Pada paragraf ke-2 Hajriyanto justru menyebut kehadiran Atut di pemeriksaan KPK sebagai sikap seorang negarawan. Teks paragraf ke-1, 2, 3 adalah:

Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Thohari mengaku prihatin dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang langsung menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pada pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Sebaliknya Hajriyanto mengapresiasi sikap kooperatif Ratu Atut menghadiri pemeriksaan KK.

"Golkar menghargai sikap kooperatif dan kenegarawanan Bu Ratu Atut Chosiyah menghadapi proses hukum ini," ujar Hajriyanto

Golkar juga menghargai sikap keputusan KPK untuk menahan Ratu Atut. Sepanjang keputusan KPK itu didasarkan alasan yang jelas. "Alasan harus obyektif, rasional, berdasarkan alat-alat bukti yang kuat dan jauh dari unsur-unsur politik," kata Wakil Ketua MPR itu" (www.viva.co.id diakses 17 September 2017)

Dibalik kutipan pada paragraf ke-3 berita tanggal 20 Desember 2013, asumsi yang mengemuka adalah adanya 2 (dua) makna yang saling mensyaratkan satu sama lain. Di satu pihak, menyatakan penghargaan terhadap keputusan KPK, namun di pihak

lain penghargaan itu akan melekat manakala penegakan hukum disandarkan pada obyektifitas, rasional, serta didukung alat-alat bukti kuat. Hajriyanto dengan sangat tegas menolak campur tangan politik dalam kasus yang menjadi perbincangan publik di penghujung 2013 tersebut.

Dari aspek tematik, *frame* Viva.co.id yang hadir dengan struktur skrip tanpa unsur "kapan" (*when*) ini muncul 3 tema utama. Pertama, pernyataan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Thohari yang prihatin dengan keputusan KPK menahan Ratu Atut pada pemeriksaan perdana sebagai tersangka (paragraf ke-1). Kedua, penghargaan Hajriyanto Y. Thohari terhadap sikap kooperatif dan kenegarawanan Ratu Atut menghadiri pemeriksaan KPK (paragraf ke-2). Tema ketiga, Golkar menghargai keputusan KPK menahan Ratu Atut sepanjang didasarkan atas alasan yang jelas, obyektif, rasional, berdasarkan alat-alat bukti yang kuat dan jauh dari unsur-unsur politik (paragraf ke-3)

Ketiga tema tersebut dalam teks, ditulis secara berurutan dan saling melengkapi dalam 3 (tiga) paragraf awal. Tema-tema ini jika dianalisis dari sudut pandang maksud diturunkannya berita, di satu pihak bisa dipandang obyektif, akan tetapi secara *implisit* bisa dimaknai sebagai langkah Viva.co.id untuk secara tersembunyi mengangkat citra positif seorang Atut dari stempel negatif yang melekat pasca penahanan dirinya oleh KPK. Asumsi ini didasarkan pada pemakain kutipan pendapat Hajriyanto Y. Thohari pada paragraf ke-2.

Unsur detail teks berita dapat dijumpai pada 6 paragraf terakhir yang secara prinsip ditulis untuk melengkapi 3 tema utama sebelumnya. Elemen detail diantaranya berisi proses penahanan Atut serta kasus yang menjadi penyebab dirinya (Atut) ditahan oleh KPK. Terdapat pula pencantuman aspek

yuridis yang mendasari KPK melakukan tindakan tersebut (paragraf ke-8).

Secara retorik, bentuk penonjolan dilakukan dengan penggunaan istilah "Jumat Keramat" (dalam tanda kutip di teks), label otoritas kenegarawanan, label Wakil Ketua MPR serta kalimat "Namun KPK belum menerbitkan surat penyidikan untuk Atut di kasus ini (paragraf terakhir).

Bagi publik, teks paragraf ke-4 yang berbunyi: "KPK langsung menahan Ratu Atut Chosiyah di "Jumat Keramat," 20 Desember 2013....." adalah hal yang cukup menarik. Makna "Jumat keramat" dalam kebiasaan Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) memang terkesan menakutkan. Alasannya KPK sering menggunakan hari itu untuk menahan target buruannya. Sehingga seringkali tersangka yang dipanggil KPK pada jumat keramat sudah mengetahui akan seperti apa nanti nasibnya. (Juli 2018). Padahal kata "keramat" yang merupakan kata pinjaman dari kata Arab "*karomat/karomah*" itu mengandung arti suci (kbbi.web.id. diakses 16 Juli 2018)

Dalam konteks pemakaian istilah tersebut oleh Viva.co.id pada teks berita, sepertinya dimaksudkan untuk menyindir atau paling tidak mengingatkan KPK agar mengedepankan aspek hukum dalam penanganan kasus Atut, jangan sampai makna "suci" yang melekat pada hari jumat tereduksi oleh perilaku atau kebijakan-kebijakan yang mencederai konstitusi. Penegakan hukum juga tidak boleh memberi ruang dari kemungkinan intervensi kelompok-kelompok tertentu yang bermaksud mempolitikasi kasus Atut untuk kepentingan kelompoknya. Penegasan agar kasus Atut tidak dihubungkan dengan kepentingan lain juga dinyatakan Astari dan Birowo (2014). Dalam temuannya menunjukkan bahwa portal berita VIVAnews tidak berharap kasus Atut dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Banten

dicampur adukkan dengan keberadaan dirinya sebagai kader Golkar (e-journal.uajy.ac.id diakses 25 Nopember 2018).

Sesungguhnya pilihan tema atau elemen-elemen lain dari berita Viva.co.id yang mengunggah foto Atut sedang memegang kepala. bukan disebut tidak tepat. Karena apa yang tersaji dan muncul sebagai berita, pada dasarnya merupakan hasil olahan dan konstruksi wartawan (Eriyanto, 2009:29). Dalam kaitan ini, konstruksi realitas tersebut sangat ditentukan oleh siapa yang menarik keuntungan atau pihak mana yang akan diuntungkan dengan suatu berita (Gandy dalam Hamad, 2004:21).

Sikap Golkar terhadap posisi Gubernur Perempuan di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai fungsionaris DPP Golkar - Framing Metrovnews.com

Golkar dianggap kurang tegas dalam menyikapi persoalan Ratu Atut Chosiyah terkait kapasitasnya sebagai salah satu petinggi DPP Partai Golkar. Begitulah inti dari berita Metrovnews.com yang diluncurkan ke publik tanggal 21 Desember 2013 pukul 19.45 WIB.

Berdasarkan analisis struktur sintaksis, judul "Golkar Gamang Ambil Sikap soal Atut" menunjukkan bagaimana pandangan Metrovnews.com dalam mengkritisi sikap Golkar terhadap kasus yang sedang menjerat salah satu kadernya itu. Makna yang disiratkan dari judul adalah menggugah kesadaran publik akan sisi buruk Golkar sebagai sebuah partai yang terkesan ragu-ragu dalam menentukan sikap terhadap sebuah persoalan.

Keterlibatan redaksi dalam konteks ini tampak dari *lead* serta latar yang digunakan untuk menyusun fakta. Bahwa penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi sengketa Pemilukada

Lebak ber-pretensi negatif terhadap elektabilitas dan kekuatan Golkar di Banten.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah selama 19 hari ke depan setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi sengketa Pemilu Kada Lebak.

Status Ratu Atut yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dianggap memberikan efek negatif pada elektabilitas suara dan kekuatan Partai Golkar di Banten.(www.metrovnews.com diakses 10 September 2017)

Untuk meyakinkan publik atas konstruksi makna yang diinginkan, maka Metrovnews.com memilih Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti sebagai sumber kutipan. Menurutnya, Golkar semestinya meniru langkah tegas Partai Hanura terhadap kadernya yang melakukan pelanggaran. Jeratan kasus yang melilit Atut dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh penting di Partai Beringin, diprediksi berimbas pada elektabilitas Partai Golkar di Banten (paragraf ke-3)

Penetapan kutipan dalam skema yang berurutan dan saling memperjelas pada paragraf 3, 4, dan 5, seolah mengisyaratkan pada khalayak bahwa pendapat yang disampaikan nara sumber (Ikrar Nusa Bakti) tidak *omong kosong*, tetapi sudah berdasarkan analisis atas fakta-fakta empiris. Kebenaran itu semakin lekat dengan pemberian label "Pengamat Politik LIPI" sebagai *embel-embel* kepakaran atas otoritas keilmuan seorang Ikrar.

Dalam teks, struktur skrip ternyata hanya dijelaskan oleh unsur *what, who, why*, dan *how*, sedangkan unsur *where* dan *when* tidak ditemukan. Pengamatan aspek tematik menunjukkan 2 tema yang tersaji. Pertama, status tersangka dan penahanan Ratu Atut disinyalir akan berdampak negatif terhadap

elektabilitas suara dan kekuatan Partai Golkar di Banten, mengingat keberadaan Ratu Atut sebagai salah satu Ketua DPP Golkar. Sehingga Golkar harus berani bersikap tegas dan jangan sampai melakukan kebodohan politik dengan mengambil sikap ragu-ragu. Tema ini didasarkan pada pandangan Ikrar Nusa Bakti seperti dituangkan dalam paragraf 3, 4, dan 5 yaitu:

Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti mengatakan Golkar seharusnya mengambil sikap tegas pada Ratu Atut terkait posisinya sebagai salah satu tokoh penting di Partai Beringin.....

“Seperti Hanura, pada kasus Bambang W. Suharto menjadi contoh yang benar. Padahal dia hanya disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan namun tetap diberhentikan partai. Itu adalah sikap yang tepat,” ujar Ikrar.

Sikap gamang yang ditunjukkan Partai Golkar ungkapnya dinilai sebagai kebodohan politik Partai Golkar. “Harus tegas mengambil keputusan kalau ingin meningkatkan atau mempertahankan elektabilitas Partai Golkar di Banten yang saat ini sedang sangat terpuruk akibat kasus korupsi Ratu Atut,” katanya. (www.metrotvnews.com diakses 10 September 2017)

Pada kutipan di atas, Ikrar membandingkan ketegasan Partai Hanura terhadap kadernya Bambang W. Soeharto, sebagai contoh yang tepat dan seharusnya juga dilakukan Golkar kepada Atut. Padahal Bambang W. Soeharto hanyalah disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan namun oleh Hanura tetap diberhentikan.

Tema kedua, menyangkut solusi yang ditawarkan Ikrar Nusa Bakti bahwa untuk menyelamatkan *image* partai di mata publik, maka memberhentikan Ratu Atut dari jabatannya sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar adalah langkah paling tepat.

Pernyataan ini tertuang dalam paragraf ke-6 (terakhir) yang berbunyi:

Oleh karena itu, mau tidak mau Golkar harus mengembalikan citra itu dengan memberhentikan Ratu Atut dari jabatan structural di Partai Golkar yakni Ketua DPP. “Terlepas ia memang tokoh penyandang dana yang cukup besar di Partai Golkar.” ucapnya. (www.metrotvnews.com diakses 10 September 2017)

Pada bagian struktur retorika, penekanan dilakukan dengan pengutipan istilah “kebodohan politik” seperti tertuang pada paragraf ke-5 dari pernyataan Ikrar Nusa Bakti. Kebodohan adalah gaya bahasa *sarkas* yang bermakna keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi bersifat subjektif (id.wikipedia.org/wiki/Kebodohan, diakses 10 Juli 2018). Pemilihan kutipan kata ini bisa dipandang upaya pihak redaksi untuk memperkuat persepsi negatif Partai Golkar sebagai partai yang tidak memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan politik. Foto berita metrotvnews.com yang diunggah tanggal 21 Desember 2013 adalah bendera Partai Golkar.

Sikap Golkar terhadap posisi Gubernur Perempuan di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai fungsionaris DPP Golkar -Framing Viva.co.id

Seakan menjawab pandangan Ikrar Nusa Bakti yang dimuat Metrotvnews.com pada tanggal yang sama yakni tanggal 21 Desember 2013, Viva.co.id menurunkan berita dengan memfokuskan sorotannya terhadap status Atut dalam perspektif hukum, di mana secara hukum Atut belum diputus bersalah oleh pengadilan.

Dari analisis sintaksis, pandangan Viva.co.id tersebut diwujudkan melalui skema judul berita berbunyi: ARB: “Jangan Hukum Orang Belum Divonis Bersalah”. Judul ini sekaligus meng-*counter* apa yang diungkapkan Ikrar

Nusa Bakti di Metrotvnews.com. Terlebih jika diamati dari sub judulnya, yang secara eksplisit menjelaskan alasan mengapa judul utama dimuat.

Di paragraf awal yang juga sebagai *lead* berita, diungkapkan tentang permintaan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie agar masyarakat khususnya insan pers mengedepankan azas hukum praduga tak bersalah dalam kasus Atut-meskipun dia (Atut) sudah berstatus tersangka. Alasannya, karena pengadilan belum memvonis Gubernur Banten itu bersalah.

Dalam teks, sesuai judul yang tertera Viva.co.id mewawancarai Aburizal Bakrie sebagai satu-satunya sumber. Menurut Ketua Umum Partai berlambang Pohon Beringin ini, karena Atut belum diputus bersalah oleh pengadilan maka tidak ada hak bagi institusi, sekelompok orang atau seseorang untuk menjustifikasi bahwa Atut sudah bersalah. Dan sikap Partai Golkar tegas, tidak akan memberhentikan Atut sebagai fungsionaris DPP. Kutipan-kutipan ini diletakkan saling mengapit dalam 7 paragraf awal dari total 9 paragraf yang ada dalam teks.

Dominasi pandangan Aburizal Bakrie pada skema penyusunan berita yang tanpa diimbangi wawancara kepada sumber berita lain sebagai penyeimbang, mengindikasikan bagaimana Viva.co.id berusaha mengkonstruksi sebuah kebenaran yang tidak berimbang kepada khalayak. Dalam konteks ini, bisa disebut Viva.co.id sedang berupaya meminimalisasi hal-hal yang berpotensi memperburuk sosok Atut. Kondisi ini memungkinkan terjadi karena media massa melalui wartawannya bukan sebatas mengambil realitas yang sebenarnya, tapi juga membentuk berita termasuk membentuk citra atas seseorang (Eriyanto, 2009:29).

Analisis aspek skrip menunjukkan bahwa berita yang semua unsur 5W+1H-

nya telah terpenuhi tersebut muncul karena Aburizal Bakrie melihat secara hukum Atut belum diputus bersalah oleh pengadilan meskipun dia (Atut) sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang mendekam di penjara.

Dari struktur tematik, ada 3 (tiga) tema dalam teks berita. Pertama, permintaan Aburizal Bakrie agar masyarakat terutama pers menghormati azas hukum praduga tak bersalah terhadap kasus Ratu Atut, alasannya karena Atut belum diputus bersalah oleh pengadilan. Dalam teks, tema ini diletakkan pada paragraph ke-1 dan ke-2 yang berbunyi:

Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, sabtu 21 Desember 2013 meminta masyarakat terutama pers untuk menghormati asas hukum praduga tak bersalah pada Ratu Atut Chosiyah.....

Ratu Atut katanya belum menjalani proses peradilan sehingga belum ada putusan hukum apapun yang memastikan ia bersalah. Karena itu publik jangan menghakimi Atut seolah-oleh ia sudah bersalah. (www.viva.co.id diakses 17 September 2017)

Tema kedua berkenaan dengan sikap Partai Golkar yang tidak akan memberhentikan Ratu Atut sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar, karena yang bersangkutan belum divonis salah. Tema yang diposisikan tepat setelah tema pertama yakni pada paragraf ke-3 dan ke-4 tentunya bertujuan untuk mendukung tema pertama yang juga sebagai tema utama.

“Kalau belum diputus bersalah, dia tidak bersalah. Menyedihkan kalau dierhentikan (dari kepengurusan Golkar) padahal dia belum (divonis) bersalah.” kata ARB kepada wartawan.....(paragraf ke-4 dalam www.viva.co.id diakses 17 September 2017).

Sedangkan tema ketiga masih didasarkan pernyataan Ketum Golkar bahwa partai Golkar tidak akan menghalang-halangi atau mendesak-desak KPK terkait kasus yang

disangkakan kepada Atut dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada KPK serta pengadilan. Dalam tema ketiga ini (paragraf 6 dan 7), Aburizal Bakrie bahkan melengkapinya dengan pernyataan seperti tertera pada paragraf ke-7, yaitu: "Kita harus menegakkan hukum. Hukum adalah panglima. Bukan berdasarkan (tekanan) pers," ujar ARB....." (www.viva.co.id diakses 17 September 2017)

Penempatan penggalan kutipan ini pada tema terakhir, sepertinya dimaksudkan untuk mengingatkan khalayak, bahwa hanya proses hukum sajalah yang berhak memutuskan Atut bersalah. Selebihnya, sebesar apapun tekanan entah dari mana asalnya tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Dari sudut pandang ini, tampak sekali bagaimana Viva.co.id cenderung melakukan pembelaan terhadap Atut dengan bersembunyi dibalik upaya penegakkan hukum atas nama azas praduga tidak bersalahnya.

Struktur retorik dalam teks berupa pengutipan pernyataan Aburizal Bakrie terkait istilah "Hukum adalah panglima," sebagaimana terdapat pada paragraf ke-7. Dengan menggunakan idiom ini harapan yang ingin disampaikan redaksi adalah agar publik tidak mudah menjustifikasi Atut bersalah sebelum proses hukum menyatakan demikian.

Penonjolan lain adalah ditampilkannya 2 (dua) paragraf akhir yang menggambarkan bagaimana ARB sedang berbicara dihadapan Forum Rektor Indonesia untuk memaparkan visi dan misi dia (ARB) sebagai calon presiden. Paragraf ini sebenarnya bisa saja dihilangkan, atau misalnya ditampilkan tidak perlu dengan kalimat yang bisa dikatakan cukup detail. Memang tidak mudah ditafsirkan apa motif dibalik ditampilkannya 2 paragraf akhir tersebut. Bisa jadi, semua itu dilakukan untuk membangun citra seorang Aburizal Bakrie

sebagai tokoh yang memiliki kapabilitas cukup baik sehingga Forum Rektor seluruh Indonesia berkepentingan mendengarkan visi dan misinya. Harus diakui bahwa melalui berbagai kesempatan dan beragam media saat itu Aburizal Bakrie berupaya membangun citra politiknya sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kepentingan rakyat yang layak untuk dipertimbangkan sebagai calon presiden. (Tamaka dan Susanto, 2013:32)

Foto berita terkait tanggapan Aburizal Bakrie terhadap posisi Ratu di DPP Partai Golkar memperlihatkan sosok Sang Ketua Umum Golkar sedang berpidato di sebuah forum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Metrotvnews.com dalam membingkai berita Partai Golkar dalam kasus Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia cenderung bersifat negatif. Kecenderungan ini bisa dilihat dari struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik yang disajikan. Diantaranya dari sisi pemilihan judul, sumber kutipan dan tema yang ternyata cenderung tidak menguntungkan Partai Golkar.

Meskipun ada upaya membingkai kasus Ratu Atut Chosiyah ke arah lebih netral, namun dalam beberapa hal, dibalik upaya tersebut, tercium aroma keberpihakan media. Penyusunan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik berita turut memperkuat asumsi tersebut. Salah satunya dapat ditelusuri melalui pemilihan tokoh yang dijadikan sebagai sumber rujukan. Dari 2 judul berita Viva.co.id, komentar yang ditonjolkan, semuanya berasal dari para petinggi Partai Golkar yang secara garis besar justru menguntungkan partai berlambang Pohon Beringin ini..

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Universitas Erlangga
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit LKiS
- Eriyanto, 2009. *Analisis Framing. Konstruksi. Ideologis dan Politik Media*. Cet. IV. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- DeFleur, Melvin and Sandra Ball-Rocheach, Sandra. 1989. *Theories of Mass Communication, (5Edition)*. New York: Logman
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Ganit.
- Kriyantono, Rahmad. 2012. *Teknik Praktis. Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media. Public Relations. Advertising. Komunikasi. Organisasi Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siebert, Fred S. et al. 1986. *Empat Teori Pers (terj. Putu Laxman Senjaya Pendit)*. Jakarta: PT Intermamasa
- Tamaka, Glendy Indra, Susanto, Eko Harry. 2013. *Pencitraan Aburizal Bakrie Melalui Televisi*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1 (1). Hlm. 32-50.
- Triyono, Agus. 2016. *Konstruksi Pembakaran Tempat Ibadah Di Tolikara Tahun 2015 Pada Majalah Tempo Edisi Juli 27-2 Agustus 2015*. Prosiding Seminar Nasional Dan Pembentukan Karakter. Universitas Gontor. Hlm. 168-185
- Wulandari, Theresia D. 2016. *Pemerintahan Jokowi Kala menurut Kacamata 5 Media Massa di Indonesia*. *Jurnal ASPIKOM*, 3 (1). Hlm. 88-103

Internet

- ARB : Jangan Hukum Orang yang Belum Divonis Salah. (2013, 21 Desember). viva.co.id
- Astari, Verena Patricia Wuri dan Antonius, Birowo Mario. 2014. *Pemberitaan Penetapan Ratu Atut Chosyiah Sebagai Tersangka KORupsi (Analsis Framing Pemberitaan Penetapan Gubernur Ratu Atut Chosyiah, Sebagai Tersangka Korupsi pada VIVAnews dan Tempo.co Periode 17-18 Desember 2013)*. Tersedia di <http://e-journal.uajy.ac.id/6536/1/jurnal.pdf>
- Atut Ditahan, Golkar: Kami Hargai Putusan KPK. (2013, 20 Desember). viva.co.id
- Atut Ditahan KPK: Ical, Aduh Sedih Betul. .(2013, 20 Desember). metro.tv/news.com
- Atut- Rano Didukung 11 Parpol Di DPRD. (2011, 14 Juli) Tersedia dari. <https://nasional.kompas.com/read/2011/07/14/15113482/Atut-Rano.Didukung.11.Parpol.di.DPRD>
- Atut Langsung Ditahan Di Jumat Keramat. (2013, 18 Desember) Tersedia dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/atut-langsung-ditahan-di-jumat-keramat.html>.
- Golkar Gamang Ambil Sikap Soal Atut. .(2013, 21 Desember). metro.tv/news.com
- Kebodohan. Tersedia dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebodohan> Ratu Atut Dinyatakan Tersangka Korupsi. (2013, 17 Desember). Tersedia dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131216_ratuatuttsk.